



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



**Perubahan Rencana Kerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2022**

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK
Jl. Letnan Jendral Sutoyo , Telp/Fax (0561) 732509/741641
Kota Pontianak- 81147 Pontianak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH.....	5
KOTA PONTIANAK S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2022	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	17
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2022	6
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	19
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	19
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	20
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	20
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23
Tabel 3.1 Rincian Perubahan Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022.....	25
Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022.....	26

KATA PENGANTAR

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, maka Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini mengakomodir dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak selama bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini masih mengacu kepada Perencanaan Strategis tahun 2022-2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Pontianak, Juli 2022
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pontianak



Amirullah, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690804 199303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Sejalan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kerja dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pada Rencana Kerja Tahun 2022 ini Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mempunyai 3 (tiga) program prioritas dan 1 (satu) program rutin/wajib penunjang organisasi yang kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidang-bidang teknis.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 sesuai dengan suatu dasar yang mengikat yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah sebagai panduan dan bahan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencan Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antara tingkat pemerintahan daerah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Format penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK S/D TRIWULAN II TAHUN 2022

Berdasarkan RKPD tahun 2022, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah dan pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak s/d triwulan II tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2022

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
1	5.02.02	Program Pengeloan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	9.534.200.051	0%	2.733.517.996	0,000%	29
			Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	-	0%	-	0,000%	-
			Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	-	0%	-	0,000%	-
			Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	-	0%	-	0,000%	-
			Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	-	0%	-	0,000%	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan rencana anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	5.985.726.725	29	2.109.356.900	29	35
	5.02.02.2.01.01	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	1.050.900.000,00	1	459.700.000	50	44
	5.02.02.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2	1.056.431.500,00	1	539.000.000	50	51
	5.02.02.2.01.03	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	30	582.600.000,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.01.04	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	30	202.020.000,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.01.05	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	30	180.820.000,00	30	154.535.000	100	85
	5.02.02.2.01.06	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	120	394.750.000,00	-	131.250.000	-	33

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
5.02.02.2.01.07	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2	685.432.025,00	-	217.625.000	-	32
5.02.02.2.01.08	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD	5	1.005.717.900,00	-	393.279.200	-	39
5.02.02.2.01.09	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun	1	245.052.500,00	-	140.600.000	-	57
5.02.02.2.01.10	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	14	5.799.800,00	14	5.300.000	100	91
5.02.02.2.01.11	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun	29	49.998.000,00	29	9.850.000	100	20
5.02.02.2.01.12	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	2	4.798.000,00	2	1.800.000	100	38
5.02.02.2.01.13	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penganggaran yang dilaksanakan	10	521.407.000,00	1	56.417.700	10	11
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase tersedianya dokumen perbendaharaan	100%	330.407.700	45	116.974.300	45	35%
5.02.02.2.02.01	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang cair	11.000	16.009.800,00	3.764	1.190.400	34	7
5.02.02.2.02.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dapat disusun	1	8.574.900,00	-	900.000	-	10
5.02.02.2.02.03	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	150	9.294.800,00	90	3.840.000	60	41
5.02.02.2.02.04	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang disusun	1	8.574.900,00	-	3.400.000	-	40
5.02.02.2.02.05	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang disusun	4	37.449.800,00	2	6.729.600	50	18

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.02.2.02.06	6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jangka waktu dilaksanakannya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	10.234.700,00	6	4.250.000	50	42
	5.02.02.2.02.07	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24	23.900.000,00	12	8.400.000	50	35
	5.02.02.2.02.08	8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	87.425.000,00	1	1.450.100	100	2
	5.02.02.2.02.09	9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.000	23.874.800,00	3.443	13.500.000	69	57
	5.02.02.2.02.10	10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang disusun	1	23.894.800,00	-	2.000.000	-	8
	5.02.02.2.02.11	11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1	81.174.200,00	1	71.314.200	100	88
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	100%	746.024.958	48%	190.207.719	48%	25%
	5.02.02.2.03.01	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12	8.743.680,00	6	771.840	50	9
	5.02.02.2.03.02	2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Kertas Kerja dan Berita Acara Rekonsiliasi	12	46.398.180,00	6	22.637.382	50	49

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.02.2.03.03	3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Per Urusan, Organisasi dan Pemerintahan	4	4.220.623,00	2	1.712.903	50	41
	5.02.02.2.03.04	4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan konsolidasian/Pemerintah Kota Pontianak	12	108.412.585,00	6	47.803.264	50	44
	5.02.02.2.03.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Raperda, Raperwa, Perda dan Perwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	145.716.690,00	2	36.561.822	50	25
	5.02.02.2.03.06	6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	2.655.500,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.03.07	7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	103.030.000,00	2	1.500.000	200	1
	5.02.02.2.03.08	8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD yang disusun	1	1.590.100,00	-	214.008	-	13
	5.02.02.2.03.09	9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi yang disusun	1	58.999.820,00	-	17.175.000	-	29
	5.02.02.2.03.10	10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi yang disusun	1	19.510.000,00	-	2.000.000	-	10
	5.02.02.2.03.11	11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan satuan sekolah yang dibina	172	69.059.280,00	30	4.952.400	17	7

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.02.2.03.12	12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang dibina	26	74.053.500,00	26	22.414.100	100	30
	5.02.02.2.03.13	13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen data statistik yang disusun	1	103.635.000,00	-	32.465.000	-	31
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.714.838.468	17	269.320.977	17	16
	5.02.02.2.04.02	1 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi pemerintah daerah yang disusun	1	24.999.900,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.04.03	2 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah yang disusun	1	27.499.900,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.04.04	3 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah yang disusun	1	27.499.800,00	-	3.310.000	-	12
	5.02.02.2.04.05	4 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah yang disusun	1	26.999.800,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.04.06	5 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah yang disusun	1	27.000.000,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.04.09	6 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jangka waktu pelayanan penyaluran dana darurat dan mendesak	12	1.580.839.068,00	6	266.010.977	50	17
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jangka waktu pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	12	757.202.200	6	47.658.100	50%	6%
	5.02.02.2.05.01	1 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumentasi data keuangan yang disajikan	7	26.822.500,00	-	-	-	-
	5.02.02.2.05.02	2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/peningkatan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan	2	610.279.700,00	-	42.408.100	-	7

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.02.2.05.03	3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapat pembinaan sistem informasi bidang keuangan	30	120.100.000,00	-	5.250.000	-	4
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	4.665.154.467		503.071.306		503.071.306
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	4.665.154.467	67%	503.071.306	67%	11%
	5.02.03.2.01.01	1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yg disusun	1	71.720.000,00	-	18.300.000	-	26
	5.02.03.2.01.02	2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yg disusun	1	32.746.600,00	-	-	-	-
	5.02.03.2.01.03	3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1	52.226.600,00	1	41.726.600	100	80
	5.02.03.2.01.04	4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1	31.203.600,00	-	-	-	-
	5.02.03.2.01.05	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	7.350.000,00	1	3.050.000	100	41
	5.02.03.2.01.07	6 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat yang terbit atas nama Pemerintah Kota Pontianak	30	2.988.229.000,00	-	53.340.698	-	2
			Jumlah polis asuransi barang milik daerah	3	-	3	-	100	-
			Jangka Waktu Pertanggungan asuransi	12	-	3	-	25	-
	5.02.03.2.01.08	7 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	30	285.114.900,00	26	92.358.600	87	32
	5.02.03.2.01.09	8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penetapan status penggunaan tanah dan bangunan milik pemerintah kota pontianak	30	16.817.100,00	-	-	-	-
	5.02.03.2.01.10	9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penghapusan Barang Milik Daerah yang diterbitkan	12	695.891.267,00	4	223.595.708	33	32

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
			Jumlah hari penyewaan PCC yang terjual	110	-	23	-	21	
			Jumlah fasilitasi penjualan barang milik Pemerintah Kota Pontianak	3	-	-	-	-	
	5.02.03.2.01.11	10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	21.543.000,00	1	19.643.000	100	91
	5.02.03.2.01.12	11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah kompilasi laporan hasil pengadaan dan laporan hasil pemeliharaan barang	30	294.969.700,00	30	51.056.700	100	17
			Jumlah laporan KIB dan KIR serta Laporan Stok Opname (BHP)	90	-	90	-	100	
			Jumlah laporan aset dari dana di luar APBD	1	-	-	-	-	
	5.02.03.2.01.13	12 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	250	167.342.700,00	-	-	-	-
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100%	4.049.978.727	0%	372.670.100	0%	9
			Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100%			-		-
			Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	55%			-		-
	5.02.04.2.01	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	4.049.978.727	0%	372.670.100	-	9
			Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutahirkan	66%			-		-
			Persentase pelaksanaan tindak lanjut terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau retribusi daerah	100%			-		-
	5.02.04.2.01.01	1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	9.499.980,00	-	5.900.000	-	62

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.04.2.01.02	2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen data potensi/pengembangan pajak daerah dan atau dokumen penyusunan kebijakan pajak daerah yang disusun	2	209.590.440,00	-	-	-	-
	5.02.04.2.01.06	3 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah doklumen Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	632.050.000,00	-	3.000.000	-	0
			Jangka waktu (bulan) pemeliharaan dan pengolahan basis data pajak daerah	12	-	6	-	50	
	5.02.04.2.01.04	4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket pekerjaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang yang disediakan	4	996.183.480,00	1	120.086.700	25	12
	5.02.04.2.01.08	5 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	500	93.064.772,00	3.737	-	747	-
	5.02.04.2.01.09	6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang mendapat layanan konsultasi pajak daerah	200	294.240.940,00	-	219.000	-	0
	5.02.04.2.01.12	7 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	250	66.054.210,00	1.193	1.852.400	477	3
	5.02.04.2.01.05	8 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pendataan	200	299.910.000,00	775	62.350.000	388	21
	5.02.04.2.01.03	9 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200	99.970.000,00	23	9.000.000	12	9
	5.02.04.2.01.11	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat penagihan yang dapat disampaikan	205.800	784.743.695,00	139	72.997.000	0,07	9
	5.02.04.2.01.13	11 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan	8	159.965.000,00	19	27.410.000	238	17
	5.02.04.2.01.14	12 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	404.706.210,00	6	69.855.000	300	17
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	25.511.733.509		11.954.256.897		11.954.256.897
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	9	27.704.500	4	705.000	44	3

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	4.160.000,00	-	705.000	-	17
	5.02.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	80	2.160.000,00			-	-
	5.02.01.2.01.05	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10	4.820.000,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.01.06	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	12.404.500,00	3	-	60	-
	5.02.01.2.01.07	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	4.160.000,00	1	-	50	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	19.682.797.434	6	10.437.018.218	50	53
	5.02.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	18.842.357.434,00	6	9.985.868.218	50	53
	5.02.01.2.02.03	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	837.610.000,00	6	451.150.000	50	54
	5.02.01.2.02.07	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	2.830.000,00	2	-	40	-
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	90	277.940.160	87	6.800.000	97	2
	5.02.01.2.05.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	105	138.380.000,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.05.10	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	2	14.736.160,00	1	6.800.000	50	46
	5.02.01.2.05.11	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20	124.824.000,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	1.323.891.678	6	305.693.602	50	23

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	22.683.760,00	6	11.174.100	50	49
	5.02.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50	544.082.428,00	32	134.946.800	64	25
	5.02.01.2.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	20	2.486.000,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.06.04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	150.902.000,00	3	63.602.000	25	42
	5.02.01.2.06.05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	373.033.490,00	6	61.906.200	50	17
	5.02.01.2.06.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	28.000.000,00	6	8.735.000	50	31
	5.02.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	202.704.000,00	6	25.329.502	50	12
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	804.976.242	-	-	-	-
	5.02.01.2.07.05	1 Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	20	147.676.090,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.07.06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	40	657.300.152,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	2.549.698.723	6	940.834.061	50	37
	5.02.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	13.000.000,00	6	4.211.000	50	32
	5.02.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	1.008.167.593,00	6	288.944.311	50	29
	5.02.01.2.08.03	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	48.400.000,00	6	1.900.000	50	4

N0	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7	
	5.02.01.2.08.04	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	1.480.131.130,00	6	645.778.750	50	44
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	212	844.724.772	56	263.206.016	26	31
	5.02.01.2.09.01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1	29.062.500,00	1	11.706.252	100	40
	5.02.01.2.09.02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12	223.203.600,00	7	91.587.843	58	41
	5.02.01.2.09.06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	197	269.274.500,00	47	96.684.321	24	36
	5.02.01.2.09.07	4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tetap tak berwujud yang dipelihara	1	53.020.000,00	-	-	-	-
	5.02.01.2.09.09	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	270.164.172,00	1	63.227.600	100	23
					43.761.066.754		15.563.516.299		15.563.516.299

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Adapun Capaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengeloaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	0%	0%
		Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	0%	0%
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	0%	0%
		Presentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	0%	0%
		Presentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	0%	0%

Capaian kinerja program pengelolaan keuangan daerah belum terealisasi sampai dengan triwulan 2 (dua) disebabkan capaian kinerja baru dapat terukur pada saat akhir tahun anggaran berakhir. Hal ini disebabkan faktor pembagi dalam perhitungan capaian kinerja baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Sementara capaian kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan rencana anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	29	29
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya dokumen perbendaharaan	100	45	45
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	100	48	48
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	17	17
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jangka waktu pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	12	6	50

Masih rendahnya capaian realisasi kegiatan (kurang dari 50%) antara lain disebabkan sebagian besar sub kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV antara lain sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja program dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Adapun Capaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	0%	0%

Capaian kinerja program pengelolaan barang milik daerah belum terealisasi sampai dengan triwulan 2 (dua) disebabkan capaian kinerja baru dapat terukur pada saat akhir tahun anggaran berakhir. Hal ini disebabkan faktor pembagi dalam mengukur capaian kinerja yaitu total jumlah barang milik daerah baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Sementara capaian kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	67%	67%

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja kegiatan sudah cukup baik (di atas 60%). Adapun sub kegiatan yang belum terealisasi disebabkan dijadwalkan terealisasi pada triwulan 3 dan 4 yaitu sub kegiatan penyusunan standar harga, sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Adapun Capaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6**Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100%	0%	0%
		Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	0%
		Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	55%	0%	0%

Realisasi capaian program masih 0% disebabkan capaian kinerja baru dapat terukur pada akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena faktor pembagi dalam perhitungan capaian kinerja seperti jumlah total pelayanan pajak yang diajukan, jumlah total wajib pajak yang wajib membayar pajak baru dapat terukur setelah berakhirnya satu tahun masa pajak.

Sementara capaian kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7**Capaian Kinerja Kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	0%	0%
		Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutahirkan	66%	0%	0%
		Persentase pelaksanaan tindak lanjut terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau retribusi daerah	100%	0%	0%

Realisasi capaian kinerja masih 0% disebabkan capaian kinerja baru dapat terukur pada akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena faktor pembagi dalam perhitungan capaian kinerja seperti jumlah fasilitasi terhadap pelayanan pajak yang diajukan, jumlah total objek pajak yang dapat dimutahirkan dan jumlah total pelanggaran peraturan perpajakan baru dapat terukur setelah berakhirnya satu tahun masa pajak.

Sampai dengan berakhirnya triwulan 2 (dua) tahun 2022, terdapat sub kegiatan yang belum optimal bahkan belum terealisasi capaian kinerjanya yaitu sub kegiatan perencanaan pengelolaan pajak (0%), sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (0%), sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (25%), sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (0%), sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah (0,07%). Hal ini disebabkan sub kegiatan tersebut dijadwalkan diselesaikan pada triwulan 3 (tiga) dan triwulan 4 (empat). Selain itu belum optimalnya capaian kinerja sub kegiatan disebabkan adanya proses pengerjaan output yang relatif panjang terkait adanya kerjasama dengan pihak di luar Pemerintah Kota Pontianak yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dan sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Output yang dihasilkan merupakan inovasi Badan Keuangan Daerah kota Pontianak yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah berupa peningkatan aplikasi E-Ponti menjadi aplikasi pengelola pendapatan asli daerah dan integrasi melalui perluasan kanal pembayaran digital serta pada sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa sinkronisasi peta Arcgis Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan SISMIOP PBB.

Sementara itu terdapat capaian kinerja sub kegiatan di atas 100% seperti penetapan wajib pajak daerah (747%), penyelesaian keberatan pajak daerah (capaian 477%), sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (capaian 388%), sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah (238%) dan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (300%) Hal ini disebabkan penentuan target kinerja yang belum terukur dengan baik. Terhadap hal tersebut telah dilakukan penyesuaian target kinerja sub kegiatan dimaksud pada Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tahun 2022.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	-	-

Capaian kinerja belum terealisasi disebabkan pengukuran kinerja tingkat kepuasan ASN di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dilakukan pada akhir tahun yaitu setelah semua pelayanan kesekretariatan dilaksanakan.

Sementara capaian target kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9**Capaian Kinerja Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	9	4	44
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	6	50
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	90	87	97
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	6	50
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	6	50
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	212	56	26

Tabel di atas menunjukkan masih terdapat kegiatan yang capaian kinerja di bawah 50% yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah.

Hal ini disebabkan adanya sub kegiatan yang dijadwalkan terealisasi di triwulan 3 (tiga) yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa penyusunan dokumen Perubahan Rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023. Rendahnya realisasi kegiatan pengadaan barang milik daerah disebabkan masih berlangsungnya proses pengadaan sementara rendahnya realisasi

kegiatan pemeliharaan barang milik daerah disebabkan rendahnya permintaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 99 (sembilan puluh sembilan) Sub Kegiatan. Setelah dilakukan perubahan, jumlah program dan kegiatan tidak mengalami perubahan namun jumlah sub kegiatan berkurang dari 99 (sembilan puluh sembilan) menjadi 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan.

Pengurangan sub kegiatan ini disebabkan antara lain adanya pengurangan besaran pagu dasar. Walaupun terdapat pengurangan sub kegiatan, target capaian program tidak mengalami perubahan dari target awal rencana kerja tahun 2022. Sementara target kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan antara lain berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 dan tingkat kinerja yang dapat dicapai dengan pagu dasar yang baru.

3.2 Pendanaan

Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 ini jumlah pagu indikatif mengalami perubahan dari Rp 43.761.066.754,00 menjadi Rp 62.186.026.856,00. Peningkatan pagu indikatif sebesar Rp 18.424.960.102,00 disebabkan adanya belanja bunga yang sebelumnya tidak dianggarkan sebesar Rp 4.645.306.250,00 dan penambahan belanja tidak terduga sebesar Rp 20.136.181.811,00. Sementara pagu dasar yang pada hakekatnya untuk membiayai program rutin dan prioritas di luar belanja pegawai gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar Rp 6.328.187.914,00.

Rincian perubahan pagu indikatif pada Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Perubahan Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2022

No	Uraian Belanja	APBD 2022	RKPD-P 2022	Bertambah/(Berkurang)
1	Belanja Pegawai	18.842.357.434	18.814.017.389	-28.340.045
2	Belanja Bunga	-	4.645.306.250	4.645.306.250
3	Belanja Tidak Terduga	1.580.839.068	21.717.020.879	20.136.181.811
4	Pagu Dasar	23.337.870.252	17.009.682.338	-6.328.187.914
	Jumlah	43.761.066.754	62.186.026.856	18.424.960.102

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	837.610.000	921.550.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	1.150.000.000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 dokumen	0 dokumen	12 bulan	12 bulan	2.830.000		Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	3.250.000
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										277.940.160	172.956.160				342.190.000	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah ASN yang dikelola kepegawaianya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	105 setel	88 setel	90 ASN	88 ASN	138.380.000	128.220.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	142.190.000
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	90 ASN	88 ASN	14.736.160	14.736.160	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	50.000.000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 orang	5 orang	90 ASN	88 ASN	124.824.000	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	150.000.000
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.323.891.678	1.107.910.790				1.076.856.374	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	22.683.760	22.683.760	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	19.995.922
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	50 unit	70 unit	12 bulan	12 bulan	544.082.428	480.015.240	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	311.940.736
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 unit	3 unit	12 bulan	12 bulan	2.486.000	1.375.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	30.000.000

5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	150.902.000	126.990.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	201.500.000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	373.033.490	329.449.790	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	221.750.688
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	18.845.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	28.000.000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	202.704.000	128.552.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	263.669.028
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										804.976.242	117.273.890				848.165.486	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jumlah unit pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 Unit	2 unit	63 Unit	45 Unit	147.676.090	12.303.890	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	148.165.486
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	40 Unit	43 Unit	63 Unit	45 Unit	657.300.152	104.970.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	700.000.000
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.549.698.723	2.566.153.414				2.211.593.600	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13.000.000	11.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	14.300.000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.008.167.593	1.082.650.708	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	955.000.000

5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48.400.000	38.600.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	20.543.600
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.480.131.130	1.433.902.706	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	1.221.750.000
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											844.724.772	808.068.742					874.857.139
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	212 unit	209 unit	29.062.500	29.062.500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	38.750.000
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 unit	10 unit	212 unit	209 unit	223.203.600	173.377.200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	317.939.200
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	197 unit	197 unit	212 unit	209 unit	269.274.500	311.011.250	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	253.858.140
5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Aset tetap Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	0 Unit	212 unit	209 unit	53.020.000		Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	74.309.799
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	212 unit	209 unit	270.164.172	294.617.792	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat Keuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	190.000.000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											9.534.200.051	30.847.415.207					6.834.423.109
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											5.985.726.725	2.937.323.900					3.158.819.611
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	1.050.900.000	566.640.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	201.012.000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	1.056.431.500	657.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	201.012.000

5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100 persen	100 persen	582.600.000	162.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	534.970.000
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100 persen	100 persen	202.020.000	30.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	32.220.000
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah DPA- SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100 persen	100 persen	180.820.000	166.235.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	111.675.000
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	120 Dokumen	70 Dokumen	100 persen	100 persen	394.750.000	156.850.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	145.970.000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	685.432.025	272.025.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	526.862.448
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Perkada tentang perubahan Penjabaran Perubahan APBD	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	1.005.717.900	540.784.200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	558.005.513
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	245.052.500	209.014.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	265.022.000
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100 persen	100 persen	5.799.800	5.799.800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	62.471.000
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	29 Dokumen	29 Dokumen	100 persen	100 persen	49.998.000	19.850.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	143.955.000

5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembayaran yang disusun	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	4.798.000	4.798.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	95.311.000
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan Penganggaran yang dilaksanakan	Persentase penyusunan rancangan anggaran daerah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 kegiatan	3 kegiatan	100 persen	100 persen	521.407.000	146.327.900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	280.333.650
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										330.407.700	294.307.700				330.414.500	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah SP2D yang cair	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	11000 Dokumen	11000 Dokumen	100 persen	100 persen	16.009.800	16.009.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	16.010.000
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dapat disusun	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	8.574.900	2.824.900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	8.575.000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen SPD yang diterbitkan	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	150 Dokumen	150 Dokumen	100 persen	100 persen	9.294.800	13.794.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	9.295.000
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang Disusun	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	8.574.900	8.574.900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	8.575.000
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Penimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen laporan Dana Penimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang disusun	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	37.449.800	37.449.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	37.450.000
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jangka waktu dilaksanakannya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	10.234.700	20.234.700	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	10.234.900

5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pemungutan/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	24 Dokumen	24 Dokumen	100 persen	100 persen	23.900.000	23.900.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	23.900.000
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	87.425.000	57.075.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	87.425.000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5000 Dokumen	5000 Dokumen	100 persen	100 persen	23.874.800	23.874.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	23.875.000
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang disusun	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	23.894.800	9.394.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	23.900.000
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Persentase tersedianya dokumen Perbendaharaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 persen	100 persen	81.174.200	81.174.200	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	81.174.600
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											746.024.958	585.479.703				742.301.998
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	8.743.680	8.743.680	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	8.733.000

5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Kertas Kerja dan Berita Acara Rekonsiliasi	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	46.398.180	46.398.180	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	46.576.000
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per urusan, organisasi dan pemerintahan	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	4.220.623	6.420.623	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	5.820.000
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasian/Pemerintah Kota Pontianak	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	108.412.585	97.692.585	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	46.576.000
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Raperda, Raperwa, Perda dan Perwa Pertanggungjawaban APBD	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	145.716.690	141.750.890	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	145.600.000
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	2.655.500		Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	5.822.000
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	103.030.000	1.500.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	75.686.000
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen laporan analisis pertanggungjawaban APBD yang disusun	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.590.100	490.100	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	5.822.000

5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi yang disusun	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	58.999.820	56.999.820	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	75.686.000	
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi yang disusun	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	19.510.000	8.230.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	17.466.000	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah OPD dan satuan sekolah yang dibina	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	172 Unit Kerja	130 Unit Kerja	100 persen	100 persen	69.059.280	38.084.175	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	145.497.998	
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah BLUD yang dibina	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	26 Unit Kerja	26 Unit Kerja	100 persen	100 persen	74.053.500	87.028.450	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	87.330.000	
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen data statistik yang disusun	Persentase tersedianya dokumen akuntansi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	103.635.000	92.141.200	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	75.687.000	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												1.714.838.468	26.398.101.829				2.134.000.000
5	2	2	2.04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen investasi pemerintah daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	24.999.900	3.154.900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	25.000.000	
5	2	2	2.04	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	27.499.900		Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	27.500.000	

5	2	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	27.499.800	4.650.126.050	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	27.500.000
5	2	2	2.04	5	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	26.999.800		Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	27.000.000
5	2	2	2.04	6	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	27.000.000	27.800.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	27.000.000
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase dokumen data penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jangka waktu pelayanan penyaluran dana darurat dan mendesak	Persentase tersedianya dokumen data Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	1.580.839.068	21.717.020.879	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	2.000.000.000
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah										757.202.200	632.202.075				468.887.000	
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	Jumlah Dokumentasi data keuangan yang disajikan	Jangka waktu pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	7 Dokumen	2 dokumen	12 bulan	12 bulan	26.822.500	26.822.500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	89.603.000
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/peningkatan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan	Jangka waktu pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 paket	3 paket	12 bulan	12 bulan	610.279.700	485.279.700	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	325.556.000
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	Jumlah OPD yang mendapat pembinaan sistem informasi bidang keuangan	Jangka waktu pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 opd	30 opd	12 bulan	12 bulan	120.100.000	120.099.875	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	53.728.000
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										4.665.154.467	3.004.118.037				5.321.617.400	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										4.665.154.467	3.004.118.037				5.321.617.400	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang Disusun	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	71.720.000	71.720.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	65.300.000

5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah yang disusun	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	32.746.600		Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	65.250.000
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	52.226.600	52.226.600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	38.799.800
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen kebijakan pengelolaan barang milk daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	31.203.600	31.203.600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	49.144.900
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	7.350.000	7.350.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	49.144.900
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jangka Waktu Pertanggungjawaban asuransi jumlah polis asuransi barang milk daerah jumlah sertifikat yang terbit atas nama Pemerintah Kota Pontianak	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan 3 dokumen	9 bulan 3 dokumen	100 persen	100 persen	2.988.229.000	1.568.094.995	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	2.875.500.000
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen hasil penilaian barang milk daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 dokumen	30 dokumen	100 persen	100 persen	285.114.900	169.453.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	412.835.000
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah dokumen penetapan status penggunaan tanah dan bangunan milik pemerintah kota pontianak	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 dokumen	30 dokumen	100 persen	100 persen	16.817.100	3.473.100	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	8.850.000
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah fasilitasi penjualan barang milik Pemerintah Kota Pontianak jumlah hari penyewaan PCC yang terjual jumlah SK Penghapusan Barang Milk Daerah yang diterbitkan	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milk daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 kegiatan 110 hari 12 dokumen	2 kegiatan 110 hari 10 dokumen	100 persen	100 persen	695.891.267	616.741.342	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase barang milk daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	1.316.846.000

5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	21.543.000	21.543.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	38.799.800
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	jumlah kompilasi laporan hasil pengadaaan dan laporan hasil pemeliharaan barang jumlah laporan aset dari dana di luar APBD jumlah laporan KIB dan KIR seta Laporan Stock Opname (BHP)	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 dokumen	30 dokumen	100 persen	100 persen	294.969.700	294.969.700	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	243.905.000
												1 Dokumen	1 Dokumen								
												90 dokumen	90 dokumen								
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Persentase tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	250 Orang	250 Orang	100 persen	100 persen	167.342.700	167.342.700	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100%	157.242.000
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										4.049.978.727	3.811.058.727				3.489.529.381	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										4.049.978.727	3.811.058.727				3.489.529.381	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	9.499.980	9.499.980	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	9.486.000
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia		Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutahirkan		100%	100%								Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah		55%	55%								Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen data potensi/pengembangan pajak daerah dan atau dokumen penyusunan kebijakan pajak daerah yang disusun	Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	209.590.440	209.590.440	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	364.171.000
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia		Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutahirkan		100%	100%								Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	

						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%									Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan / retribusi yang diselesaikan tepat waktu		Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%									Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah wajib pajak yang mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	200 WP	200 WP	100 persen	100 persen	99.970.000	92.440.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	99.970.000
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%									Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen	
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan / retribusi yang diselesaikan tepat waktu		Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%									Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Paket Pekerjaan	4 Paket Pekerjaan	100 persen	100 persen	996.183.480	996.183.480	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	394.138.000
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%									Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen	
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan / retribusi yang diselesaikan tepat waktu		Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%									Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah objek pajak yang dilakukan pendataan	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	200 OP	900 OP	100 persen	100 persen	299.910.000	289.850.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	299.910.000

						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%									Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen	
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	Jangka Waktu (bulan) pemeliharaan dan pengolahan basis data pajak daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan							Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	317.971.000
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah Dokumen Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	632.050.000	574.250.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen		
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%								Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen		
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu		Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%									Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	128.846.000
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah Laporan Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	100%	100%	500 Dokumen	220000 Dokumen	100 persen	100 persen	93.064.772	93.064.772	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen		
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		Persentase pelaksanaan tindak terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dan atau teribusi daerah	55%	55%								Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi	60 persen		
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu		Persentase terfasilitasinya pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi sesuai ketentuan	100%	100%									Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia	100 persen	213.364.124
						Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	Jumlah Wajib Pajak yang mendapat layanan konsultasi pajak daerah	Persentase data objek pajak dan atau retribusi yang dapat dimutakhirkan	100%	100%	200 WP	200 WP	100 persen	100 persen	294.240.940	133.590.940	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100 persen		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 ini berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Perubahan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya Rencana Kerja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan Perangkat yang membidangi fungsi lain. Akhir kata semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pontianak, Juli 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pontianak



Amirullah, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19690804 199303 1 005